



SURAT EDARAN BERSAMA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MENTERI KEUANGAN

Nomor : 0080 /M.PPN/04/2009
SE -1223 /MK/2009
Lampiran : 5 (Lima) Berkas
Perihal : Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2010

Jakarta, 16 April 2009

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
2. Jaksa Agung
3. Kepala Kepolisian RI
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara di Jakarta

Menindaklanjuti hasil Sidang Kabinet Paripurna membahas Rancangan Awal RKP Tahun 2010 tanggal 14 April 2009 dengan pokok bahasan Rancangan Awal RKP TA 2010 serta dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dengan ini disampaikan Pagu Indikatif Tahun 2010 (Lampiran I) yang merupakan ancar-ancar untuk setiap Kementerian Negara/Lembaga guna menyempurnakan Rancangan Awal RKP Tahun 2010.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk setiap Kementerian Negara/Lembaga diminta menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2010, dengan mengacu dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Prioritas-prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2010, sebagaimana tersebut pada Lampiran II (Buku I Rancangan Awal RKP Tahun 2010). Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai program dan kegiatan prioritas yang terkait dengan Prioritas Pembangunan Nasional diminta untuk memberikan konfirmasi atau mengusulkan perubahan/penyempurnaan terhadap kegiatan prioritas dan/atau alokasi anggaran yang tercantum dalam Buku I Rancangan Awal RKP Tahun 2010. Usulan perubahan atau konfirmasi tersebut agar dituangkan dalam masing-masing Renja K/L.
2. Prioritas-prioritas pembangunan bidang yang akan dilaksanakan pada tahun 2010, sebagaimana tersebut pada Lampiran III (Buku II Rancangan Awal RKP Tahun 2010). Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai program dan kegiatan prioritas yang terkait dengan prioritas pembangunan bidang diminta untuk memberikan konfirmasi atau mengusulkan perubahan/penyempurnaan terhadap kegiatan prioritas dan/atau alokasi anggaran yang tercantum dalam Buku II Rancangan Awal RKP Tahun 2010. Usulan perubahan atau konfirmasi tersebut agar dituangkan dalam masing-masing Renja K/L.
3. Prioritas-prioritas pembangunan daerah (dimensi kewilayahan) yang akan dilaksanakan pada tahun 2010, sebagaimana tersebut pada Lampiran IV (Buku III Rancangan Awal RKP Tahun 2010). Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan di daerah diminta untuk mengonfirmasi, mengusulkan perubahan/penyempurnaan serta memberikan rincian program dan kegiatan prioritas dan/atau alokasi anggaran yang tercantum dalam Buku III Rancangan Awal RKP Tahun 2010. Usulan perubahan atau konfirmasi tersebut agar dituangkan dalam masing-masing Renja K/L.
4. Dalam rangka menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja, kebijakan untuk subsidi, *Public Service Obligation* (PSO) dan belanja lainnya yang bersifat khusus merupakan satu kesatuan yang utuh dari kebijakan Kementerian/Lembaga terkait.
5. Penyusunan Renja K/L memprioritaskan:
 - a. Program dan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang dan/atau prioritas pembangunan daerah (dimensi kewilayahan) yang tercantum dalam RKP Tahun 2010;
 - b. Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat;
 - c. Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri;

- d. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (*multi-years*);
 - e. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - f. Distribusi alokasi antardaerah dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan sinergi dengan program-program daerah.
6. Beberapa kegiatan yang harus dibatasi, yaitu
- a. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya;
 - b. Pemasangan telepon baru kecuali untuk Satker yang belum memiliki saluran telepon;
 - c. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang tupoksi (antara lain mess, wisma, rumah dinas, rumah jabatan, gedung pertemuan);
 - d. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional seperti, ambulans untuk rumah sakit, kendaraan untuk tahanan, roda dua untuk penyuluh, dan penggantian kendaraan rusak berat;
 - e. Pengeluaran lain-lain yang sejenis atau serupa tersebut di atas.
7. Dalam menyusun Renja K/L, Kementerian Negara/Lembaga agar:
- a. Memilih kegiatan yang akan didanai dengan merujuk kepada pembagian urusan dan kewenangan pusat dan daerah sebagaimana diatur didalam peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Mengupayakan sinkronisasi kegiatan dalam Renja K/L dengan kegiatan-kegiatan daerah yang dibiayai dari dana perimbangan dan dana otonomi Khusus.
8. Departemen Keuangan bersama-sama dengan Bappenas mengoordinasikan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan arah kebijakan pengalokasian DAK yang tercantum dalam Buku I Rancangan Awal RKP Tahun 2010.
9. Dalam rangka klasifikasi belanja negara menurut fungsi, Kementerian Negara/Lembaga diminta melaksanakan pencatatan sesuai Peraturan-Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai contoh, Kementerian Negara/Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan diminta mencantumkan kegiatan pendidikan tersebut dalam klasifikasi fungsi pendidikan.

10. Dalam proses penyusunan Renja K/L dilakukan Pertemuan Tiga Pihak antara Bappenas, Departemen Keuangan dan masing-masing Kementerian/Lembaga sebagaimana yang diatur dalam Buku *Petunjuk Pertemuan Tiga Pihak* (Lampiran V).

Selanjutnya, Renja K/L Tahun 2010 yang telah disusun agar disampaikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan selambat-lambatnya Senin, 4 Mei 2009 untuk digunakan sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), penyempurnaan Rancangan Akhir RKP Tahun 2010, serta penyusunan dan penelaahan RKA-K/L tahun 2010.

Himpunan Renja K/L yang disampaikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan akan dijadikan dasar dalam penetapan pagu sementara yang akan ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Keuangan dalam rangka penyusunan RAPBN 2010.

Demikian, atas perhatian Saudara/ Saudari, kami mengucapkan terima kasih.

Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas


Paskah Suzetta

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia; dan
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.


Menteri Keuangan


Sri Mulyani Indrawati



REKAPITULASI ALOKASI PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2010
(JUTA RUPIAH)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA	TIDAK MENCIKAT				JUMLAH	MUNGKIL	PNBP	DIBP	TOTAL
		Rupiah	Pendamping	REIS	PDN					
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	175.975,1	0,0	0,0	0,0	175.975,1	49.377,8	0,0	0,0	225.352,9
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.415.135,2	349,6	6.876,0	0,0	1.422.360,8	527.263,5	0,0	0,0	1.949.624,3
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.015.512,7	0,0	4.300,0	0,0	1.019.812,7	1.058.160,8	0,0	0,0	2.077.973,5
005	MAHKAMAH AGUNG	987.050,0	0,0	0,0	0,0	987.050,0	4.194.205,3	0,0	0,0	5.181.255,3
006	KEJAKSAAN AGUNG	974.948,3	0,0	0,0	0,0	974.948,3	1.423.598,0	0,0	0,0	2.398.546,3
007	SEKRETARIAT NEGARA	265.153,7	0,0	0,0	0,0	265.153,7	1.300.374,6	0,0	182.737,0	1.748.265,3
010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	961.891,2	6.736.729,2	2.489.097,8	0,0	10.187.718,2	410.918,3	35.396,9	0,0	10.634.033,4
011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	698.700,0	0,0	0,0	0,0	698.700,0	4.659.760,1	203.215,0	0,0	5.561.675,1
012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	2.429.474,8	1.264.275,0	4.257.100,0	800.000,0	8.750.849,8	27.737.835,2	0,0	0,0	36.488.684,9
013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	1.098.243,6	0,0	0,0	0,0	1.098.243,6	3.094.759,0	447.234,5	0,0	4.640.237,2
015	DEPARTEMEN KEUANGAN	3.779.721,1	63.118,1	413.613,9	0,0	4.256.453,1	11.166.522,0	23.000,0	35.042,9	15.481.018,0
018	DEPARTEMEN PERTANIAN	6.298.460,5	48.583,0	312.700,0	0,0	6.659.743,5	1.254.678,1	36.581,7	0,0	7.951.003,3
019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	1.187.112,3	0,0	0,0	0,0	1.187.112,3	378.922,1	98.328,8	0,0	1.664.363,2
020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.018.580,7	0,0	5.016,0	0,0	5.023.596,7	803.721,6	1.740.435,8	0,0	7.567.754,1
022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	10.704.296,4	39.629,5	1.831.000,0	0,0	12.574.925,9	2.536.944,2	237.403,5	829.649,3	16.178.922,9
023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	41.823.796,5	760.576,0	2.396.810,7	0,0	44.981.183,2	7.420.262,9	3.672.686,8	1.902.383,8	57.976.516,8
024	DEPARTEMEN KESEHATAN	11.340.871,4	134.600,0	792.400,0	0,0	12.267.871,4	4.579.455,8	82.116,0	3.253.600,9	20.183.044,2
025	DEPARTEMEN AGAMA	12.575.392,4	64.900,0	416.871,0	0,0	13.057.163,4	11.777.081,1	268.965,9	240.904,9	25.344.115,4
026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.117.255,3	0,0	0,0	0,0	2.117.255,3	384.192,8	317.632,0	6.050,0	2.825.130,1
027	DEPARTEMEN SOSIAL	3.118.116,1	0,0	0,0	0,0	3.118.116,1	306.546,7	3.210,3	0,0	3.427.873,1
029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	1.191.709,5	2.501,6	65.037,0	0,0	1.259.248,1	927.586,6	971.992,8	0,0	3.158.827,4
032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.924.884,4	37.700,0	473.253,0	0,0	2.435.837,4	636.272,6	25.847,1	0,0	3.097.957,0
033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	24.651.618,1	336.859,0	7.544.724,3	0,0	32.533.201,4	1.411.372,8	10.443,8	18.000,0	33.973.018,0
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	165.799,8	0,0	0,0	0,0	165.799,8	42.572,4	0,0	0,0	208.372,2
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	78.106,0	0,0	0,0	0,0	78.106,0	33.297,4	0,0	0,0	111.403,4
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	59.604,2	0,0	0,0	0,0	59.604,2	40.893,4	0,0	0,0	100.497,6
040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	744.197,5	0,0	0,0	0,0	744.197,5	361.146,5	10.864,4	0,0	1.116.208,5
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	77.996,4	0,0	0,0	0,0	77.996,4	36.206,7	0,0	0,0	114.203,1

KODI	KEMENTERIAN/LEMBAGA	BIDANG MINGKAT					MINGKAT	PNBP	BIBI	TOTAL
		RUPAH	Pendamping	REGON	IBDN	JUMLAH				
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	331.107,3	0,0	0,0	0,0	331.107,3	72.377,6	0,0	7.092,1	410.577,0
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	315.438,5	0,0	5.000,0	0,0	320.438,5	79.850,1	1.902,2	0,0	402.190,8
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	600.661,4	0,0	0,0	0,0	600.661,4	93.363,0	53.101,8	0,0	747.126,2
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	107.362,6	0,0	1.543,1	0,0	108.905,7	23.976,9	0,0	0,0	132.882,6
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	83.092,6	0,0	5.100,0	0,0	88.192,6	35.649,9	0,0	0,0	123.842,5
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	889.706,9	0,0	0,0	0,0	889.706,9	94.307,2	0,0	0,0	984.014,0
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	434.349,9	0,0	0,0	0,0	434.349,9	63.598,7	0,0	0,0	497.948,6
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	19.306,7	0,0	0,0	0,0	19.306,7	10.862,6	0,0	0,0	30.169,2
054	BADAN PUSAT STATISTIK	936.345,8	2.500,0	15.000,0	0,0	953.845,8	805.202,4	0,0	0,0	1.759.048,2
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENAS	246.169,0	26.460,5	217.800,0	0,0	490.429,5	67.882,1	0,0	0,0	558.311,6
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	690.481,8	38.000,0	189.800,0	0,0	918.281,8	1.133.454,9	672.427,9	0,0	2.724.164,5
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	291.100,9	0,0	0,0	0,0	291.100,9	54.678,7	292,5	0,0	346.072,1
059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	446.382,3	29.100,0	150.100,0	0,0	625.582,3	267.886,2	1.581.923,4	0,0	2.475.391,9
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.339.188,6	502.600,0	2.098.000,0	200.000,0	4.139.788,6	20.050.235,7	1.452.718,4	0,0	25.642.742,7
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	403.776,4	0,0	0,0	0,0	403.776,4	207.008,0	25.945,0	0,0	636.729,4
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	85.421,8	0,0	70.000,0	0,0	155.421,8	37.667,7	0,0	0,0	193.089,5
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	308.768,5	0,0	0,0	0,0	308.768,5	56.199,2	0,0	0,0	364.967,7
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	209.218,0	0,0	0,0	0,0	209.218,0	37.653,6	0,0	0,0	246.871,5
067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	503.962,1	56.131,1	327.328,0	0,0	887.421,2	39.742,1	0,0	0,0	927.163,3
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	944.777,6	11.393,5	15.485,2	0,0	971.656,3	267.462,7	0,0	0,0	1.239.119,0
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	33.879,3	0,0	0,0	0,0	33.879,3	27.106,6	0,0	0,0	60.985,9
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	479.464,7	0,0	0,0	0,0	479.464,7	341.100,1	26.056,9	0,0	846.621,7
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	549.000,0	0,0	0,0	0,0	549.000,0	402.306,9	0,0	0,0	951.306,9
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	98.829,8	0,0	0,0	0,0	98.829,8	84.473,4	0,0	0,0	183.303,2
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	71.110,8	0,0	0,0	0,0	71.110,8	42.283,0	0,0	0,0	113.393,8
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	148.874,3	5.000,0	23.900,0	0,0	177.774,3	270.737,1	42.345,4	0,0	490.856,8
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	97.070,5	0,0	0,0	0,0	97.070,5	282.909,4	12.239,1	0,0	392.219,0
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	183.056,7	0,0	0,0	0,0	183.056,7	252.615,9	59.022,3	37.340,0	532.034,8
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	121.911,4	0,0	0,0	0,0	121.911,4	91.771,4	1.558,5	0,0	215.241,3
083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	181.356,1	0,0	205.000,0	0,0	386.356,1	47.361,9	8.216,6	0,0	441.934,6
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	28.792,8	0,0	0,0	0,0	28.792,8	24.047,7	8.294,2	0,0	61.134,7
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	21.025,6	0,0	0,0	0,0	21.025,6	31.816,7	2.816,4	0,0	55.658,7

12

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA	JUDAK MENCIKAD					JUDAK MENCIKAD	PNBP	BHU	TOTAL
		Rumpuk	Pendamping	BPHN	BDN	REVISI				
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	91.250,7	0,0	0,0	0,0	91.250,7	65.910,9	40.299,3	0,0	197.460,9
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	58.513,5	0,0	0,0	0,0	58.513,5	38.426,3	9.458,8	0,0	106.398,6
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	98.618,6	0,0	120.850,0	0,0	219.468,6	218.182,6	0,0	0,0	437.651,2
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	88.293,6	0,0	9.400,0	0,0	97.693,6	545.445,4	0,0	0,0	643.139,0
090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	810.155,3	0,0	0,0	0,0	810.155,3	483.667,8	24.540,0	0,0	1.318.363,1
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	819.959,3	0,0	0,0	0,0	819.959,3	84.559,1	0,0	0,0	904.518,4
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	898.536,4	0,0	0,0	0,0	898.536,4	95.323,1	0,0	0,0	993.859,5
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	191.229,0	0,0	0,0	0,0	191.229,0	200.838,9	0,0	0,0	392.067,9
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	311.814,2	0,0	0,0	0,0	311.814,2	156.540,2	0,0	0,0	468.354,4
100	KOMISI YUDISIAL RI	17.233,0	0,0	0,0	0,0	17.233,0	41.069,7	0,0	0,0	58.302,7
103	BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA	115.865,0	0,0	18.000,0	0,0	133.865,0	38.197,1	0,0	0,0	172.062,1
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	210.000,0	0,0	0,0	0,0	210.000,0	42.807,9	0,0	0,0	252.807,9
105	BADAN PENANGGULANNGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	1.199.629,5	0,0	0,0	0,0	1.199.629,5	16.461,1	0,0	0,0	1.216.090,6
107	BADAN SAR NASIONAL	314.402,3	0,0	34.000,0	0,0	348.402,3	217.308,8	0,0	0,0	565.711,1
	TOTAL	152.306.093,9	10.161.006,0	24.515.105,0	1.000.000,0	188.982.205,9	1.639.256,8	12.208.513,7	6.512.800,9	22.899.777,3